

DI KABUPATEN PURBALINGGA Alokasi Pupuk Bersubsidi Turun

PURBALINGGA (KR) - Alokasi pupuk bersubsidi untuk Purbalingga tahun 2021 ini mengalami penurunan. Kendati demikian, Dinas Pertanian setempat mengaku optimis akan kecukupan pupuk, asalkan rekomendasi penggunaan pupuk dapat ditaati dan petani tidak boros dalam penggunaan pupuk.

"Pengurangan kuota pupuk tidak signifikan. Alokasinya masih mendekati usulan dari kelompok tani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok," kata Kepala Dinas Pertanian Purbalingga, Mukodam mengungkap hal itu, Kamis (9/4).

Rincian Dinas Pertanian Purbalingga menunjukkan, alokasi pupuk urea 15.342 ton, terealisasi 99,9 persen dari usulan 15.347 ton. Alokasi pupuk SP36 1.048 ton (96,5 persen) dari usulan 1.085 ton. Alokasi pupuk ZA 376 ton (75,5 persen) dari usulan 497 ton. Pupuk NPK alokasi 8.139 ton (35,2 persen) dari usulan 23.069 ton. Alokasi pupuk organik 2.043 ton (26,7 persen) dari usulan 7.650 ton.

"Tahun 2020, alokasi urea 77 persen, pupuk SP36 10,4 persen, pupuk ZA 37 persen, pupuk NPK 33,5 persen dan pupuk organik 6,8 persen dari usulan kelompok tani dalam RDKK," jelas Mukodam.

Terkait harga pupuk bersubsidi, Mukodam menyebutkan, di wilayah Purbalingga berlaku Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Di Kios Pupuk Lengkap (KPL), harga perkilogram pupuk urea Rp 2.250, pupuk SP-36 Rp 2.400, pupuk ZA Rp 1.700, pupuk NPK Rp 2.300, pupuk NPK Formula Khusus Rp 3.300, pupuk organik Granul Rp 800, pupuk organik cair Rp 20 ribu perliter.

Mukodam mengakui, tidak semua desa terdapat KPL sehingga ada KPL yang membawahi wilayah salur lebih dari dua desa dengan jarak yang bervariasi.

Tidak jarang terjadi kesepakatan HET tersebut masih ditambahkan ongkos kirim dari KPL ke lokasi kelompok tani. "Dalam hal ini, nota pembelian pupuk dan ongkos kirim harus dipisah agar tidak ditafsirkan sebagai kenaikan HET," jelasnya.

Rincian harga pupuk nonsubsidi di wilayah Purbalingga, NPK eceran Rp 9 ribu perkilogram, harga kemasan Rp 180 ribu hingga 200 ribu perkemasan 25 kilogram, pupuk SP36 eceran Rp 2.500 perkilogram, harga kemasan Rp 110 ribu perkemasan 50 kilogram.

Pupuk Urea eceran Rp 7 ribu hingga 8 ribu perkilogram, harga kemasan Rp 155 ribu sampai 160 ribu perkemasan 25 kilogram, ZA eceran Rp 5 ribu perkilogram, harga kemasan Rp 200 ribu perkemasan 50 kilogram. (Rus)

PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DI BANYUMAS

Warga Cukup Datang di Kantor Desa

PURWOKERTO (KR) - Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan surat keterangan Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto membuat Inovasi Eraterang Pos Desa (Erposdesa). Masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus surat-surat keterangan harus di kantor pengadilan, tetapi cukup di kantor desa.

Ketua PN Purwokerto, Arif Nuryanta mengungkapkan hal itu usai sosialisasi Inovasi Eraterang Pos Desa (Erposdesa) PN Purwokerto di Pendapa Si Panji, Rabu (7/4). Surat-surat keterangan dimaksud antara lain surat keterangan bebas pidana, tidak sedang dicabut hak pilih, dan keterangan bebas hutang.

Menurutnya, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto membuat Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan surat keterangan di Pengadilan. "Masya-

rakat nantinya cukup ke kantor desa dan akan dilayani melalui aplikasi Eraterang.

Untuk tahap awal, PN Purwokerto menerapkan pelayanan Eraterang untuk desa di dua kecamatan terluar di Kabupaten Banyumas, yakni Kecamatan Lumbir dan Pekuncen. Dalam pelayanan surat keterangan ini PN Purwokerto bekerja sama dengan pemerintahan desa dan kantor pos. Sedangkan untuk persyaratannya, permohonan surat keterangan cukup mudah, hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK), dan pas foto ukuran 4X6, kemudian mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan.

"Jika semua persyaratan lengkap, pelayanan pembuatan surat keterangan akan cepat selesai. Untuk pembuatan surat melalui aplikasi Eraterang dikenakan biaya Rp 10.000. Biaya tersebut merupakan PNBPN atau Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan PP No-

mor 5 tahun 2019," jelas Arif Nuryanta.

Setelah surat keterangan jadi atau sudah diverifikasi oleh Pengadilan, lanjut Arif, nanti akan dikirim oleh pegawai Pos. Surat-surat kete-

rangan tersebut biasanya dipergunakan sebagai persyaratan untuk pendaftaran aparat desa, calon anggota DPRD, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon bupati, dan lainnya. (Dri)



Ketua PN Purwokerto Arif Nuryanta melakukan sosialisasi inovasi Eraterang Pos Desa. (KR-Driyanto)

UNTUK SEBAGIAN WILAYAH SRAGEN

Air Bersih Akan Dilayani dari WKO

SRAGEN (KR) - Perusahaan Daerah Ari Minum (PDAM) Kabupaten Sragen memutuskan tidak ikut mengambil *support* air bersih dari Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri melalui program Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar dan Sragen (Wosokus).

Keputusan itu diambil lantaran tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menarik air dari WGM sampai di Sragen.

Sebagai gantinya, PDAM Sragen akan memaksimalkan penggunaan air dari Waduk Kedung Ombi (WKO) yang sudah direstui oleh Pemprov dan pemerintah pusat," kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtonegoro Sragen, Supardi, Jumat (9/4).

Menurut rencana, air dari WKO

diprojeksikan untuk melayani wilayah Sragen bagian barat. Di antaranya Sumberlawang, Miri, Gemolong, Tanon dan sebagian Mondokan jika memungkinkan. Supardi mengakui, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Khususnya di wilayah utara Bengawan Solo. Tahun 2018 lalu sudah membangun sumur di Sambungmakan, dilanjutkan 2019 pemasangan pipa transmisi

ke Kecamatan Jenar.

Supardi mengungkapkan, program Wosokus sudah dibahas sejak 2013 namun biaya operasionalnya cukup tinggi, sehingga dinilai terlalu berat untuk diikuti. Hal itu dikarenakan air dari WGM tidak bisa mengalir ke Sragen secara gravitasi dan harus menggunakan pompa sampai Solo.

"Air dari WGM ke Solo terlebih dulu, kemudian ke Sragen dan harus dipompa lagi sehingga biayanya tinggi. Debit air dari WGM juga hanya bisa mengcover pelanggan di Kecamatan Masaran dan Sidoharjo, sehingga program tersebut dibatalkan," tandas Supardi.

Dikatakan, saat ini PDAM

Sragen menggenjot persiapan untuk penggunaan air dari WKO. Selain sudah mengantongi izin dari pemerintah, kesiapan dana juga sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui APBN. "Izin sudah kami dapatkan. Nanti debit yang diambil dari WKO 150 liter perdetik dan tahun 2023 dimulai," paparnya.

Supardi juga menyatakan, sudah ada pembahasan mulai dari indeks dan tahun ini fokus pada persiapan lahan untuk instalasi di WKO. Proyek pengambilan air WKO nantinya sepenuhnya disuplai dana dari APBN sekitar Rp 60 sampai Rp 70 miliar. Anggaran itu untuk membangun jaringan pipa dari lokasi WKO hingga ke pelanggan. (Sam)

HUKUM

DUGAAN KORUPSI DANA JPS

Penyidik Kejaksaaan Masuki Tahap Pemberkasan

PURWOKERTO (KR) - Pengusutan kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas, yang ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Purwokerto, saat ini memasuki tahap pemberkasan.

Kajari Purwokerto, Sunarwan, Kamis (8/4), menjelaskan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka. "Sekarang sudah pemberkasan, mungkin sebentar lagi sidang. Masih pemberkasan di penyidik, belum diserahkan ke penuntut umum," kata Sunarwan.

Menurutnya hingga saat ini belum ada tambahan tersangka lain karena berdasarkan alat bukti, baru mengarah kepa-

da AM (26) dan MT (37) warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Banyumas, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2021.

Sunarwan menambahkan apa yang dilakukan kedua tersangka dengan meminta dana JPS Kemnaker tersebut tidak sesuai dengan tujuan proposal yang dibuat oleh kelompok masyarakat.

Tapi jika dana tersebut disatukan dan dialihkan ke tempat lain. Kelompok masyarakat penerima program JPS Kemnaker sama saja tidak bekerja. "Yang bekerja ya korporasi ini (usaha yang dikelola kedua tersangka, red.), sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai," ungkap Sunarwan. (Dri)

5 TAHUN JADI BURONAN

Terpidana Asusila Tertangkap

PURBALINGGA (KR) - Setelah sempat buron 5 tahun, Alfian Sutadi Aji berhasil ditangkap. Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga bekerja sama dengan Kejari Kota Bekasi berhasil menangkap terpidana kasus asusila itu di rumahnya, Perum Villa Indah Permai Kelurahan Teluk Pucung Bekasi, Kamis (8/4) malam.

Ketika terjerat asusila, Alfian masih berstatus mahasiswa sebuah PTN di Purbalingga. Warga Bekasi itu melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Purbalingga. Alfian didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahasiswa Fakultas Teknik itu memilih kabur setelah di vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 60 juta subsidi tiga bulan kurungan, memperoleh kekuatan hukum tetap pada 2016.

"Penangkapan Alfian Sutadi Aji berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No 2419 K/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Mei 2016 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Indra. Setelah ditangkap terpidana sempat diamankan di Kejari Kota Bekasi. Selanjutnya dibawa ke Kejari Purbalingga guna pemeriksaan oleh jaksa eksekutor pada seksi tindak pidana umum. (Rus)

Terbelit Utang, Coba Bunuh Diri

PURBALINGGA (KR) - DS (20) warga Desa Kedungjati Bukateja Purbalingga mencoba mengakhiri hidup dengan terjun dari jembatan Sungai Klwing Desa Jetis Kemangkong, Rabu (7/4) sore. Beruntung warga yang melihat aksi nekat itu berjibaku menolongnya sehingga jiwa perempuan muda itu bisa diselamatkan.

"Sempat hanyut sekitar 300 meter sebelum dievakuasi dari sungai," tutur Kapolsek Kemangkong AKP Damar Iskandar. AKP Damar mengungkapkan, sekitar pukul 16.00, DS tampak berdiri tiang pagar jembatan. Beberapa warga sempat menyapa DS, tapi tidak dijawab.

Sesaat kemudian, DS melompat dan dalam hitungan detik tubuhnya kecebur ke dalam aliran sungai.

Seorang warga yang menyaksikan kejadian spontan ikut terjun ke sungai dan berusaha menolong.

Upaya warga itu tidak sia-sia. Kendati sempat hanyut hingga 300 meter, DS bisa diselamatkan dan dibawa ke tepi sungai. Kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan kendaraan operasional Polsek Kemangkong.

Motif DS berusaha mengakhiri hidupnya diduga terkait beban utang pada koperasi di pabrik tempatnya bekerja. Uang itu jatuh tempo pada Rabu (7/4). (Rus)

COBA HILANGKAN JEJAK

Pencuri Minta KLX Dimodifikasi

BANTUL (KR) - Kasus raibnya sepeda motor KLX AB 6495 BS milik Hari Aking Budi Setyawan warga Mancingan Parangtritis Kretek Bantul menemui titik terang. KLX seharga Rp 19 juta tersebut ditemukan di sebuah bengkel di Purworejo.

Motor tersebut oleh pelaku pada awalnya ingin dilakukan perbaikan, namun keburu diendus petugas. Kini barang bukti motor yang sudah turun mesin tersebut disita penyidik Reskrim Polsek Kretek Polres Bantul Polda DIY. Sebagaimana diketahui, KLX tersebut dilarikan wisatawan dengan dalih ingin disewa Selasa lalu.

Kapolsek Kretek Kompol S Parmin SH didampingi Kanit Reskrim Iptu Jumadi SH, Jumat (9/4), mengungkapkan raibnya motor KLX terjadi Selasa sore lalu di Pantai Parangtritis Kretek Bantul. Sore itu pelaku bermaksud me-

nyewa KLX dengan kesepakatan uang sewa Rp 100 ribu per 20 menit. Setelah disepakati motor dibawa dan sampai batas waktu kesepakatan motor tidak kembali. Setelah dilakukan penyelidikan informasi jika motor KLX masuk bengkel di Dusun Kemantren Lor Desa Gebang Purworejo. Kepada penyidik, pemilik bengkel menjelaskan kronologis motor bisa masuk bengkelnya. Motor KLX masuk bengkel Rabu pagi dibawa pelaku.

Ketika pinjam motor ti-



Barang bukti motor KLX yang sudah turun mesin disita petugas Reskrim Polsek Kretek. (Roy)

SEMPAT CABULI KORBAN

Pencuri Pakaian Dalam Wanita Ditangkap

PURWOREJO (KR) - Warga Desa Kroyo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo meringkus dua pria berinisial TS dan U. Keduanya diduga merupakan spesialis pencuri pakaian dalam wanita yang selama ini meresahkan warga desa tersebut.

Terungkapnya kasus itu bermula dari keresahan warga Desa Kroyo atas adanya laporan seringnya seseorang tak dikenal masuk ke dalam rumah saat malam hari, kemudian mencuri pakaian dalam wanita. Bahkan beberapa korban mengaku mendapat perlakuan cabul dari pelaku.

Pemuda desa kemudian melakukan ronda keliling kampung untuk menangkap pelaku. "Kami sengaja melakukan ronda malam dan ketika keliling pada Minggu (4/4) dini hari, terlihat ada lampu rumah warga

yang dimatikan, lalu kami dekati dan amati," ungkap pemuda Kroyo, Jaka Maulana, Kamis (8/4).

Warga melihat ada seorang pria sedang berusaha mengcongkel jendela. Mereka kemudian mengejar dan berhasil menangkap pelaku yang diketahui berinisial TS, warga setempat.

Warga menginterogasi pelaku dan menyerahkannya kepada pemerintah desa. Dugaan TS adalah pelaku pencurian pakaian dalam dan pencabulan yang viral beberapa waktu lalu menguat ketika warga melakukan pengeledahan di rumah TS. "Ditemukan ada banyak pakaian dalam wanita, celana dalam, baju tidur, bantal hingga selimut," ucapnya.

Kepala Desa Kroyo Suprayitno menuturkan, pelaku awalnya meneguk telah mencuri pakaian dalam

perempuan. "Tapi setelah pengeledahan, ia tidak dapat berlutik lalu kami serahkan ke Polres Purworejo. TS ini sudah beraksi sejak tahun 2018," ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono, mengemukakan polisi mendapat laporan warga dan menangani kasus tersebut.

Dalam perkembangannya, polisi kembali menangkap seorang pria berinisial U yang juga diduga turut dalam aksi pencurian itu.

Penyidikan, masih terus dilakukan petugas Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Purworejo.

"Sementara kita amankan dua pelaku. Keduanya tidak hanya mencuri pakaian dalam, tapi diduga kuat juga melakukan pencabulan," tandasnya. (Jas)